

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Atmasasmita, Romli. 1982. *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Maulani, Diah Gustiniati. 2011. *Hukum Penitensia dan Sistem Pemasarakatan di Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Gunakaya, A. Widiada. 1988. *Sejarah dan Konsepsi Pemasarakatan*. Bandung: Armico.
- Panjaitan, Petrus Irwan dan Pandapotan Simorangkir. 1995. *Lembaga Pemasarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Priyatno, Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Samosir, C. Djisman. 2012. *Sekelumit tentang Penologi dan Pemasarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- _____. 2011. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soema di Pradja, R. Achmad S. dan Romli Atmasasmita. 1979. *Sistem Pemasarakatan di Indonesia*. Bandung: Binacipta.
- Wojowasito. 1995. *Kamus Bahasa Indonesia*. Bandung: Shinta Darma.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang. Nomor 12 Tahun 1995. tentang *Pemasyarakatan*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999. tentang *Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang *Perubahan Atas PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang *Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat*

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH.01.PK.05.06 Tahun 2008 tentang *Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat*.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang *Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*

Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor: M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang *Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan*.

Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung Nomor W6.PAS.Ea.PK.05.03 Tahun 2012 tentang *Susunan Keanggotaan Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung*.

C. Website

<http://banjarmasin.tribunnews.com/2012/09/24/over-kapasitas-lpsebuahbumerang>

LAMPIRAN